

MAMPU

KITA

KABAR DARI KITA

KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

EDISI 1/2018

Program MAMPU-Bappenas-DFAT Australia Melakukan Kunjungan Bersama ke Lombok, Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka memantau langsung perkembangan kegiatan program MAMPU, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, didampingi Tim MAMPU, melaksanakan kunjungan ke wilayah kerja MAMPU di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat selama dua hari pada Kamis-Jumat (24-25 Januari 2018) lalu.

1 Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) di Desa Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur

Kunjungan bersama di wilayah ini, dilakukan untuk meninjau capaian kegiatan BaKTI di beberapa wilayah di Kab. Lombok Timur, yang telah menghasilkan:

- MoU antara BaKTI dan DPRD Kab. Lombok Timur untuk koordinasi Program MAMPU.
- Advokasi kebijakan untuk meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan dengan lahirnya Renstra DP3KB, SOP P2T2A, dan Rencana Kerja dan Anggaran yang responsif gender.
- Berjalannya Reses Partisipatif di Kab. Lombok Timur yang memungkinkan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marjinal lainnya menyampaikan informasi secara langsung kepada anggota parlemen.
- Keterlibatan perempuan miskin dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

2 Migrant CARE dan submitra Perkumpulan Panca Karsa di Desa Nyerot, Kabupaten Lombok Tengah

- Terbentuknya Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Nyerot.
- Adanya peningkatan kapasitas pelaksana Desbumi dalam melakukan pendampingan kasus yang berjejar dengan Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkantibmas) dari kepolisian maupun dinas-dinas terkait.
- Adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan buruh migran asal Desa Nyerot.



3 Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Gemel, Kabupaten Lombok Tengah

- Penguatan komunitas yang berasal dari perubahan cara pandang dalam diri para perempuan anggota PEKKA.
- Komitmen anggota PEKKA untuk mendukung program perlindungan sosial pemerintah seiring dengan meningkatnya pengetahuan mereka tentang isu tersebut.
- Keterlibatan anggota PEKKA dalam proses pembangunan desa, baik sebagai anggota tim verifikasi desa maupun fasilitator yang mensosialisasikan program perlindungan sosial.



- Tim PEKKA di Kabupaten Lombok Tengah menerima dana Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Pengadilan Agama Praya untuk membantu pengurusan itsbat nikah.

4 Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), submitra Institut KAPAL Perempuan di Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara

- Sejak 2014, Sekolah Perempuan (SP) berhasil mendorong rasa percaya diri dan kesadaran kritis perempuan miskin setempat.
- Para perempuan yang belajar di SP Desa Sokong melakukan advokasi untuk pembangunan desa dan terlibat dalam Musrenbang Perempuan maupun Musrenbang desa.
- Murid-murid SP Desa Sokong mengelola dana usaha simpan pinjam, dengan nilai saat ini sebesar Rp. 30 juta, yang digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian ibu-ibu desa.
- Adanya alokasi anggaran desa untuk SP, yang akan digunakan untuk studi banding ke Lombok Timur dan untuk modal usaha.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menetapkan bahwa semua desa di Kabupaten Lombok Utara wajib mendirikan Sekolah Perempuan.
- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 mengalokasikan dana untuk replikasi 10 SP di 10 desa.

'Aisyiyah Social Media Training

MAMPU Selenggarakan Pelatihan Media Sosial untuk 'Aisyiyah dan Jaringannya



Untuk mendukung 'Aisyiyah sebagai salah satu mitranya, Program MAMPU memberikan pelatihan peningkatan kapasitas teknis untuk mengarusutamaan isu-isu perempuan dan kesehatan reproduksi melalui media sosial di Yogyakarta, Senin-Rabu (12-14 Februari 2018) lalu.

Pelatihan dipandu oleh Indonesia Voice of Women (InVow) dan diikuti oleh 20 pengurus muda 'Aisyiyah dan jaringannya. Materi pelatihan meliputi pemetaan pengguna sosial media di dunia dan Indonesia, teori berkomunikasi melalui media sosial, pelatihan pembuatan infografis dan video serta membuat perencanaan kampanye kesehatan reproduksi dengan perspektif agama melalui media sosial.

"Sebagai organisasi pembelajar yang terus berupaya menemukan pendekatan-pendekatan inovatif dan kreatif, 'Aisyiyah ingin meningkatkan kapasitas pemahaman berkampanye melalui media sosial serta memanfaatkan jejaring internal 'Aisyiyah yang kuat. Ini bagian dari dakwah 'Aisyiyah," tukas Tri Hastuti, Koordinator Program MAMPU-'Aisyiyah



'Aisyiyah Surat Edaran IVA & ASI

Advokasi 'Aisyiyah Hasilkan Surat Edaran Tes IVA dan ASI di Kabupaten Cirebon



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Cirebon dalam Program MAMPU-'Aisyiyah menjadi saksi penandatanganan Surat Edaran (SE) Tes IVA dan ASI bagi seluruh pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Cirebon oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Enny Suhaeni, Selasa (6 Februari 2018) lalu. Ini adalah salah satu usulan dari 'Aisyiyah dalam rangka meningkatkan kesehatan reproduksi dan peningkatan pemahaman dan pemberian ASI di Cirebon untuk mencetak generasi sehat Indonesia.

"SE ASI mengatur salah satunya mengenai pendirian pojok ASI dan juga sosialisasi pemberian ASI Eksklusif secara lebih intensif. Sedangkan untuk Surat Edaran IVA adalah tentang pelaksanaan Tes IVA secara reguler di puskesmas," ungkap Rita Lindrayati, Koordinator MAMPU-'Aisyiyah Cirebon. "SE ini nantinya akan berlaku di seluruh puskesmas di Kabupaten Cirebon," tambah Rita.





KOMNAS Perempuan Meluncurkan Laporan Tahunan 2017

Pada Selasa (23 Januari 2018), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) meluncurkan Laporan Tahunan 2017, yang bertema "Meneguhkan Penyikapan, Mendekatkan Hak Korban" di kantor KOMNAS Perempuan di Jakarta. Pemaparan Laporan Tahunan oleh para Komisioner KOMNAS Perempuan dilanjutkan dengan konsultasi publik, berupa sesi tanggapan dan tanya jawab serta tiga diskusi paralel.

"Bagi KOMNAS Perempuan, memperluas gerakan kultural untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan sama pentingnya dengan mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," ujar Azriana, Ketua KOMNAS Perempuan, sebagaimana dikutip Kompas (Rabu, 24/1/2018).

7 Isu Kritis Terkait Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)



KtP dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu, konflik, & bencana



KtP dalam konteks perkawinan, keluarga, dan relasi personal



KtP dalam konteks pemiskinan perempuan



Kekerasan seksual



KtP dalam Konteks Diskriminasi dan Politisasi Identitas



Penguatan gerakan sosial dan perlindungan perempuan pembela HAM



Penguatan Kelembagaan Komnas Perempuan sebagai bagian dari Lembaga Nasional HAM

Sumber :

Laporan Tahunan KOMNAS Perempuan 2017

KOMNAS Perempuan Rapat Koordinasi SPPT-PKKTP

Rapat Koordinasi Terbatas untuk Pengenalan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)

Dalam rangka membangun pemahaman bersama mengenai konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan rencana pelaksanaan program prioritas nasional "Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak", Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mengadakan rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Kamis (8 Februari 2018). Ini adalah salah satu upaya membangun dukungan terhadap percepatan penerapan konsep SPPT-PKKTP dengan

merangkul Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Catatan penting yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut dapat disimak dalam infografis berikut:



Catatan Rapat Koordinasi



Adanya kesamaan pandangan bahwa SPPT-PKKTP penting karena sistem peradilan yang sekarang ada di KUHP tidak mengakomodir hak-hak korban.



Adanya kesepakatan bersama untuk strategi percepatan implementasi SPPT-PKKTP dengan mengimplementasikan SPPT-PKKTP di beberapa area percontohan yang berbeda. Hasil pemetaan dan diskusi selama 1 hari adalah sebagai berikut:

JAWA TENGAH

SPPT-PKKTP mulai direplikasi di tingkat kabupaten, akan ada uji coba di 3 kabupaten.

KALIMANTAN TENGAH

Melihat pentingnya mengakomodir hukum adat yang tidak merugikan korban.

MALUKU

Upaya yang berbeda akan dilakukan oleh Kepulauan Maluku mengingat geografis yang berbeda dari daerah lain. Provinsi ini akan memastikan kesaksian korban dapat diterima dengan bentuk lain seperti rekaman video.

DKI JAKARTA

Memperbaiki pengelolaan dana daerah untuk penanganan kasus kekerasan.



Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Usman Basuni menginformasikan:



MoU SPPT PKKTP di tingkat Nasional telah dibuat bersama dengan semua K/L terkait, namun belum semua pihak yang terlibat dalam pembuatan MoU menandatangani kesepakatan bersama.



Sepanjang tahun 2018 KPPPA akan melakukan beberapa hal terkait SPPT-PKKTP Fokus sumber daya yang mereka miliki ke wilayah Indonesia Timur.

- Internal KPPPA perlu pembahasan lintas deputi atau asisten deputi tentang SPPT-PKKTP minimal dalam 3 kali pertemuan.
- Menganggarkan dana untuk SPPT-PKKTP di beberapa propinsi yaitu, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Bali dan Sulawesi Tenggara.



Direktur Hukum dan Regulasi dan Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak dan Olah Raga Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum menginformasikan:



SPPT-PKKTP masuk dalam RPJMN 2015 - 2019 sebagai prioritas nasional (arah kebijakan 3.5 Penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan)

- Bappenas mendukung SPPT-PKKTP lewat komitmen perencanaan dan anggaran.
- Perlu ada Pelatihan terpadu untuk menyamakan persepsi atau paling tidak ada alat KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait dengan SPPT-PKKTP.
- SPPT-PKKTP perlu dikaitkan dengan SDGs sebagai salah satu alat untuk percepatan capaian SDGs di Indonesia.

TURC Women Home Workers Festival

TURC Mengadakan Home Workers Festival 2017

Trade Union Rights Centre (TURC), salah satu mitra Program MAMPU untuk area tematik yang berfokus pada peningkatan kondisi pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja, menggelar Women Home Workers Festival 2017 di Jakarta Creative Hub, Jumat-Sabtu (22-23 Desember 2017). Festival terselenggara dengan serangkaian kegiatan seperti diskusi panel, seminar hasil penelitian tentang kondisi pekerja rumahan pada rantai pasok sektor sepatu, pemutaran film, serta praktek kerja sebagai pekerja rumahan. Festival juga diisi dengan pameran produk hasil kerja perempuan pekerja rumahan dan seni instalasi oleh organisasi pendamping pekerja rumahan dan mahasiswa institut kesenian

Jakarta (IKJ). Ikut serta pula sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk mitra Program MAMPU lainnya yaitu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI), Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) serta organisasi pekerja rumahan dari Cirebon, Tangerang dan Sukabumi.



Evania Putri, Ketua Pelaksana Women Home Workers Festival berharap, "Women Home Workers Festival dapat menjadi jembatan dan ruang diskusi bersama untuk menemukan solusi perbaikan kondisi kerja bagi para pekerja sektor informal, serta menjadi wujud nyata dalam mendorong perlindungan hukum bagi pekerjaan berbasis rumahan yang banyak didominasi oleh pekerja perempuan."

Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Informasi Lebih Lanjut:

Website: www.mampu.or.id

Twitter : @ProgramMAMPU

Email : info@mampu.or.id

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan